

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki sejumlah besar sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Sumber daya ini memerlukan pemanfaatan melalui berbagai strategi, program, dan kebijakan yang benar-benar dapat mendukung pengembangan sumber daya alam tersebut. Dalam konteks itu, sumber daya alam perlu dimanfaatkan agar tercipta masyarakat yang sejahtera dan adil sesuai dengan harapan bangsa Indonesia, yang dinyatakan dalam Undang-undang 1945 pasal 33, yang mengatur bahwa semua kekayaan alam Indonesia, baik yang di darat maupun di laut, harus dikelola dengan baik dan dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan ini, pemberdayaan sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Namun, seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di berbagai sektor, pemerintah seharusnya melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan program yang direncanakan. Di samping itu, pemerintah perlu dengan cermat memperhatikan fenomena yang ada di masyarakat.

Kontribusi positif UMKM terhadap perekonomian sangat berarti, terutama dalam skala ekonomi keluarga, serta telah memenuhi indikator-indikator kesejahteraan (Jasri et al., 2023) Selain itu, ada begitu banyak manfaat dari adanya UMKM yaitu sebagai usaha yang mampu menyerap banyak tenaga kerja serta mengurangi tingkat pengangguran publik. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (*social welfare*) dengan sendirinya menuntut tata kelola UMKM yang baik (*good governance*) (Tresyanto, 2020).. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab Pemerintah

Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan peranan yang signifikan dalam mengelola urusan pemerintahannya, termasuk aspek pembangunan ekonomi (Wibowo et al., 2022). Dengan ini, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pengatur, melainkan juga sebagai penghubung yang mendukung perkembangan usaha kecil, mikro, dan menengah serta menarik investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi elemen krusial yang mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia. Sebagai salah satu pilar ekonomi, UMKM memberikan sumbangan besar dalam membuka lapangan kerja, mendorong aktivitas ekonomi lokal, serta memperbaiki pemerataan distribusi pendapatan. Pentingnya UMKM dalam pertumbuhan ekonomi bisa terlihat dari peran dalam menciptakan kesempatan kerja, dengan sifatnya yang adaptif UMKM memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan pasar (Sarif, 2023).

Sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis (Yuningsih, 2022). Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial

untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula (Syarief, 2020).

Sesuai dengan Peraturan Hukum No. 20 Tahun 2008 mengenai Perusahaan Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), definisi UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro merujuk kepada aktivitas ekonomi yang dimiliki oleh individu dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat yang ditetapkan untuk Usaha Mikro seperti yang dinyatakan dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil merupakan kegiatan ekonomi yang beroperasi secara mandiri, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi definisi Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan hukum ini.
3. Usaha Menengah merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi kreatif yang mandiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar, dengan kriteria kekayaan bersih atau pendapatan tahunan sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang ini.

Kriteria UMKM menurut jumlah aset dan omzet yang dimiliki sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Kriteria UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta-500 Juta	>300 Juta-2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta-10 Miliar	>2,5-50 Miliar

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, 2026

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu langkah yang tepat untuk meningkatkan vitalitas. dasar kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. ketidaksetaraan dalam hidup. Pemberdayaan adalah upaya sungguh-sungguh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah serta menumbuhkan dan mengembangkannya menjadi usaha mandiri yang sukses (Miko et al., 2022).

Pemberdayaan adalah suatu bentuk penguatan sosial dalam masyarakat yang melibatkan suatu proses peningkatan kesadaran dan keterampilan yang dimiliki individu atau kelompok untuk mencapai kesuksesan (Novita, 2025). Pemberdayaan memiliki tujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek agar dapat membangun masyarakat yang mandiri, bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam konteks ini, UMKM berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. UMKM dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja dan memberikan layanan ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat. Mengingat betapa pentingnya peran UMKM dalam kemajuan ekonomi bagi suatu daerah, perlu dilakukan upaya pemberdayaan UMKM agar dapat tumbuh menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (Wulansari et al., 2021). Peran UMKM sangat penting sebagai salah satu pilar penopang perekonomian bangsa. Pengelolaan

UMKM harus berkualitas, baik dari segi produknya maupun sumber daya manusianya (Sarjana et al., 2022).

UMKM di Kabupaten Lingga saat ini menunjukkan kemajuan yang sangat baik dan mendapatkan perhatian yang luas. Produk-produk lokal dari UMKM memiliki mutu yang tinggi dan potensi besar untuk bersaing di pasar, baik di tingkat regional maupun internasional. Sebagai contoh, beberapa makanan khas Lingga, seperti kerupuk udang mentah, pastel mini (epok-epok), dan kerupuk rota, telah berhasil memasuki pasar Malaysia setelah melalui proses seleksi yang ketat. Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Lingga terus memberikan dukungan penuh dalam pengembangan serta pemasaran produk UMKM ini, termasuk membantu akses ke pasar global agar UMKM tidak hanya beroperasi di pasar domestik tetapi juga dapat mengeksport produk mereka (Febriyuanda, 2025).

Rencana dari Disperindagkop UKM Kabupaten Lingga terkait pemasaran di pasar internasional mencakup peningkatan akses promosi, pengembangan jaringan distribusi, dan kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, seperti Al-Ahmadi *Entrepreneurship Center* yang berada di Batam. Disperindagkop UKM secara proaktif mendukung para pelaku UMKM agar produk mereka dikenal dan diminati di pasar global, termasuk dengan melakukan seleksi produk dan menyusun nota kesepahaman (MoU) bersama pemerintah daerah untuk mendukung ekspor produk unggulan dari Lingga. Usaha ini bertujuan untuk menjadikan UMKM sebagai pendorong utama ekonomi daerah yang berkelanjutan serta membangun dasar ekonomi yang lebih mandiri dan inovatif di Kabupaten Lingga (Redaksi, 2025).

Pada masa terpilih, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lingga, Muhammad Nizar dan Novrizal, menyoroti visi serta misi yang mereka miliki mengenai inovasi dalam pengembangan UMKM yang berorientasi pada digital. Rencana utama mereka adalah memperluas akses pasar hingga ke tingkat internasional serta mempromosikan proses digital untuk UMKM. Mereka melihat digitalisasi sebagai sarana krusial untuk meningkatkan akses pasar UMKM, seperti dengan memanfaatkan teknologi *e-purchasing* dan membuat platform khusus yang bertujuan untuk memperkenalkan produk UMKM Lingga kepada publik. (Kutipan, 2024).

Tabel 1.2 Data UKM Kecamatan Singkep Barat

No.	Kecamatan	Tahun		
		2023	2024	2025
		Jumlah UKM	Jumlah UKM	Jumlah UKM
1.	Singkep Barat	696	698	929

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lingga, 2025.

Berdasarkan data tersebut, jumlah UKM di Kecamatan Singkep Barat menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 696 UKM, kemudian meningkat menjadi 698 UKM pada tahun 2024. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah UKM mengalami peningkatan yang cukup besar menjadi 929 UKM. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas usaha masyarakat di Kecamatan Singkep Barat terus berkembang dan terdapat potensi pengembangan UMKM yang cukup besar. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk melihat potensi yang dimiliki oleh desa-desa di Kecamatan Singkep Barat, termasuk Desa Sungai Buluh, sebagai salah satu

wilayah yang memiliki sumber daya alam yang dapat mendukung perkembangan usaha masyarakat.

Tabel 1.3 Data Jenis Ikan dan Produksi Desa Sungai Buluh Tahun 2025

No	Jenis Ikan	Produksi
1.	Hiu	0,50 ton/thn
2.	Tenggiri	0,50 ton/thn
3.	Pari	1,00 ton/thn
4.	Belanak	2,00 ton/thn
5.	Cumi	2,50 ton/thn
6.	Udang/Lobster	15,00 ton/thn
7.	Kepiting	5,00 ton/thn

Sumber: Dokumen Potensi Sumber Daya Desa Sungai Buluh, 2026

Berdasarkan data potensi sumber daya Desa Sungai Buluh, sektor perikanan menjadi salah satu potensi sumber daya alam yang dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Pada data jenis ikan dan produksi, komoditas udang/lobster tercatat memiliki produksi sebesar 15,00 ton per tahun dan menjadi salah satu komoditas dengan jumlah produksi yang cukup besar. Potensi tersebut memiliki keterkaitan dengan perkembangan UMKM pengolahan hasil perikanan, khususnya usaha kerupuk udang yang memanfaatkan udang sebagai salah satu bahan baku utama. Keberadaan produksi udang di Desa Sungai Buluh menunjukkan adanya potensi lokal yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Dengan demikian, hasil laut berupa udang tidak hanya memiliki nilai ekonomi ketika dijual dalam bentuk segar, tetapi juga dapat diolah menjadi produk UMKM seperti kerupuk udang yang berpotensi mendukung peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya perikanan dapat

menjadi salah satu dasar pendukung bagi berkembangnya UMKM berbasis pengolahan hasil laut di Desa Sungai Buluh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa Kabupaten Lingga memiliki potensi sumber daya alam dan perkembangan UMKM yang cukup besar, termasuk potensi hasil perikanan di Desa Sungai Buluh. Produksi udang/lobster yang mencapai 15,00 ton per tahun menunjukkan adanya potensi bahan baku lokal yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pengolahan. Salah satu bentuk pemanfaatan potensi tersebut adalah melalui UMKM kerupuk udang. Dengan mengolah hasil laut menjadi produk yang memiliki nilai tambah, keberadaan UMKM kerupuk udang berpotensi tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Namun, besarnya potensi tersebut belum secara otomatis menjamin berkembangnya UMKM secara optimal. Pemanfaatan hasil laut sebagai bahan baku kerupuk udang masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketersediaan bahan baku yang dipengaruhi oleh kondisi musim dan cuaca, keterbatasan modal untuk menyediakan bahan baku dalam jumlah besar, serta berbagai kendala dalam pengembangan usaha dan pemasaran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sumber daya perikanan yang tersedia dengan kemampuan UMKM dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi tersebut secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi penting dalam memberikan pemberdayaan melalui pendampingan, penguatan kapasitas

pelaku usaha, dukungan permodalan, pengembangan pemasaran, serta pemanfaatan teknologi.

Dengan menganalisis pelaksanaan pemberdayaan UMKM kerupuk udang di Desa Sungai Buluh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis mengenai upaya pemberdayaan yang dilakukan dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis potensi hasil laut. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini adalah **“Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, peneliti memiliki tujuan penelitian adalah “Menganalisis strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi akademik mengenai peran serta strategi pemerintah daerah dalam memberdayakan UMKM berbasis potensi lokal, khususnya pada UMKM kerupuk udang di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas strategi pemerintah daerah, pemberdayaan UMKM, maupun pengembangan usaha berbasis potensi sumber daya lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lingga, khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dalam merumuskan serta meningkatkan strategi pemberdayaan UMKM di Desa Sungai Buluh. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai permasalahan dan kebutuhan

pelaku UMKM, khususnya UMKM kerupuk udang, sehingga program pemberdayaan yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

2. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi pelaku UMKM mengenai pentingnya memanfaatkan berbagai bentuk program dan dukungan pemerintah dalam mengembangkan usaha. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha, baik dalam pengelolaan produksi, pemanfaatan bahan baku lokal, pemasaran, maupun pengembangan produk.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang berkaitan dengan strategi pemerintah daerah, pemberdayaan UMKM, maupun pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan usaha masyarakat.